

PENGUKURAN PEMERINGKATAN TATA KELOLA E-GOVERNMENT ANALISIS DENGAN METODE PEGI DI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA

Ii Sopiandi¹, Deffy Susanti², Wahyuno³

Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Majalengka

Email: sopiandi999@gmail.com, deffysusanti@gmail.com, wahyuno.wae@gmail.com

ABSTRAK

Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) melalui Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah melaksanakan kegiatan Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) pada pertama kalinya di tahun 2007. PeGi diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

Penelitian ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi dan Agar pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Penelitian ini dimulai dengan uji instrument validitas dan reabiliti terhadap 30 responden yang dilakukan di lokasi yang berbeda dengan lokasi penelitian. hasil uji validitas pada semua dimensi, diperoleh nilai r hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) $> r$ tabel pada $n=30$ (0,362), maka seluruh item pertanyaan semua dimensi dinyatakan valid (r hitung $> r$ tabel). Pengukuran dengan pendekatan kuantitatif analisis faktor diperoleh bahwa untuk setiap dimensi PeGI yakni pada atribut kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan mempunyai variabel (*atribut*) yang valid dan reliabel berdasarkan nilai r hitung yang tinggi dan koefisien reliabilitas *Cronbach Alpha*

Keyword : *Pemeringkatan, e-government, PeGI, TIK.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan TIK yang baik dan benar agar keberadaan TIK mampu untuk menunjang kesuksesan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Kesuksesan tata kelola perusahaan (*enterprise governance*) saat ini mempunyai ketergantungan terhadap sejauh mana tata kelola *IT Governance* dilakukan.

Perkembangan paradigma kehidupan bernegara sejak reformasi 1998, membawa suatu tuntutan terciptanya *IT Governance* atau *clean and good governance* di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kebijakan yang terarah salah satunya melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa *e-government*. *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pilihan pada masyarakat untuk mengakses informasi secara mudah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi masyarakat sehingga dapat menjadi sarana *check and balances* kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Di Indonesia penerapan *e-government* ini diatur kedalam sebuah Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional

pengembangan *e-government*. Inpres ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sehingga secara otomatis sejak dikeluarkannya Inpres ini seluruh pemerintah baik dari tingkat pusat, maupun tingkat provinsi/kabupaten dan kota, dan pemerintah desa harus mengimplementasikan instruksi Presiden ini melalui program *e-government*. Pada Instruksi Presiden tersebut sudah jelas arah dan pengembangan *e-government* di Indonesia, pemerintah mulai dari pusat dan kota serta pemerintah desa harus melaksanakan pengembangan *e-government* ini sesuai tahapan yang dicanangkan pada intruksi Presiden tersebut.

Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) melalui Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah melaksanakan kegiatan Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) pada pertama kalinya di tahun 2007. PeGi diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh

wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Kementerian KOMINFO bekerjasama dengan berbagai kalangan baik dari unsur komunitas TIK, perguruan tinggi maupun instansi pemerintah terkait. Dalam pelaksanaan PeGI, telah ditentukan lima dimensi yang akan dikaji. Kelima dimensi tersebut adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Masing-masing dimensi tersebut memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Dimensi-dimensi PeGI yang dijelaskan pada situs Direktorat *e-Government* Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa dimensi kebijakan merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi *e-Government* yaitu berupa dokumen-dokumen resmi berisi antara lain penentuan dan penetapan arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi *e-Government* di lingkungan instansi. Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK. Selanjutnya dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK. Kemudian dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan *e-Government* secara langsung (*front office*) atau tidak langsung (*back office*). Terakhir adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berinisiatif mengambil judul “Pengukuran Peningkatan Tata Kelola *E-Government* Analisis dengan Metode Pegi di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka”.

1.2. Tinjauan Pustaka

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area Networks (WAN) internet, mobile computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya

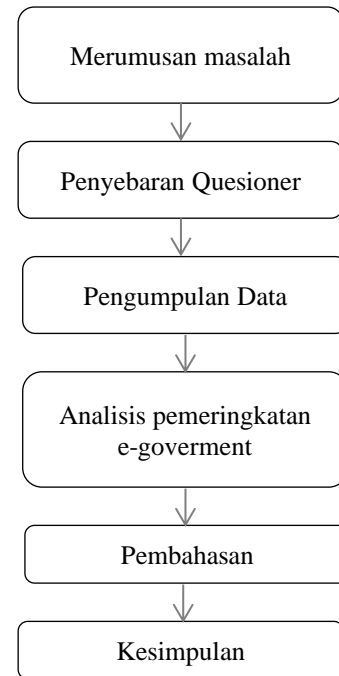
Menurut The World Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Kemudian

Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, *E-Government* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pascailah layanan terhadap

masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

1.3. Metodologi Penelitian

a. Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kerangka penelitian diatas adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis faktor. Data yang digunakan adalah data sekunder hasil penilaian Peningkatan *e-Government* di desa mandiri Kecamatan Kertajati.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diambil dari kajian literasi jurnal dan observasi ke lokasi penelitian maka peneliti mengambil beberapa permasalahan yang akan dijadikan bahan untuk instrument penelitian.

c. Instrument Penelitian

Instrumen dalam penilaian *e-Government* menggunakan skala likert 1 sampai dengan 4, dengan 1 menunjukkan sangat kurang, 2 menunjukkan kurang, 3 menunjukkan nilai baik, dan 4 menunjukkan sangat baik. Nilai total rata-rata seluruh dimensi menunjukkan kondisi penerapan *e-Government* dapat dikategorikan sebagai berikut (Fitriansyah, Budiarto & Santoso, 2013).

Analisis

d. Pendekatan analisis faktor digunakan untuk menganalisis atau menguji apakah metode PeGI masih relevan untuk digunakan menilai penerapan *e-Government* di Indonesia khususnya di tingkat pemerintahan desa. Dengan kata lain, validitas dari

setiap dimensi dan atribut PeGI akan dapat dibuktikan secara empiris.

e. Uji Instrument Validitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran. Dalam pengujian instrument pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi validitas factor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam satu faktor) dengan skor total faktor (total keseluruhan faktor). Pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total). Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor, kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara item dengan skor total faktor (penjumlahan dari beberapa faktor). Dari hasil perhitungan korelasi akan di dapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Teknik pengujian SPSS sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan *Corrected Item-Total Correlation*.

f. Uji Instrument Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas di antaranya me tode tes ulang, formula Flana gan, Cronba ch’s Alpha, metode formula KR (Kuder-Richardson) – 20, KR – 21, dan metode Anova Hoyt. Metode yang sering digunakan dalam penelitia n adalah me tode Cronbach’s Alpha. Metode ini sangat cocok diguna kan pada skor dikotomi (0 dan 1) dan akan menghasilkan perhitungan yang setara dengan menggunakan metode KR-20 da n Anova Hoyt. Reliabilitas berarti dapat dipercaya” Artinya, instrumen dapat memberikan hasil yang tepat. Alat ukur instrument dikategorikan reliabel jika menunjukkan konstanta hasil pengukuran dan mempunyai ketetapan hasil pengukuran sehingga terbukti bahwa alat ukur itu benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

2. PEMBAHASAN

a. Hasil Uji Reabilitas

Tabel 3. 1 Hasil Uji Reabilitas

| No | Dimensi | Cronbach’s Alpha | R tabel |
|----|---------|------------------|---------|
|----|---------|------------------|---------|

| | | | |
|---|---------------|-------|------|
| 1 | Kebijakan | 0,783 | 0,60 |
| 2 | Kelembagaan | 0,764 | 0,60 |
| 3 | Infrastruktur | 0,944 | 0,60 |
| 4 | Aplikasi | 0,866 | 0,60 |
| 5 | Perencanaan | 0,885 | 0,60 |

b. Hasil Pemeringkatan Dimensi Kebijakan

Hasil analisis didapatkan skor pemeringkatan dimensi kebijakan adalah 2.79, dan nilai median 3.00 dengan standar deviasi 0.34. Hasil pemeringkatan dimensi kebijakan termasuk kategori **Baik**, dapat dijelaskan bahwa indikator berjumlah dan berkualitas cukup baik dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan *e-Government* namun masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi *e-Government* pada masa yang akan datang

c. Hasil Pemeringkatan Dimensi Kelembagaan

Hasil analisis didapatkan skor pemeringkatan dimensi kelembagaan adalah 3.41 dan nilai median 3.50 dengan standar deviasi 0.49. Hasil pemeringkatan dimensi kelembagaan termasuk kategori **Baik**, dapat dijelaskan bahwa indikator berjumlah dan berkualitas cukup baik dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan *e-Government* namun masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi *e-Government* pada masa yang akan datang

d. Hasil Pemeringkatan Dimensi Infrastruktur

Hasil analisis didapatkan skor pemeringkatan Dimensi Infrastruktur adalah 2.43, median 2.25 dengan standar deviasi 0.46. Hasil pemeringkatan dimensi Infrastruktur termasuk kategori **Kurang**, dapat dijelaskan bahwa indikator sudah ada namun masih perlu ditambah dari segi jumlah dan ditingkatkan secara kualitas.

e. Hasil Pemeringkatan Dimensi Aplikasi

Hasil analisis didapatkan skor pemeringkatan Dimensi Aplikasi adalah 3.26, median 3.16 dengan standar deviasi 0.38. Hasil pemeringkatan dimensi Aplikasi termasuk kategori **Baik**, dapat dijelaskan bahwa indikator berjumlah dan berkualitas cukup baik dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan *e-Government* namun masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi *e-Government* pada masa yang akan datang.

f. Hasil Pemeringkatan Dimensi Perencanaan

Hasil analisis didapatkan skor pemeringkatan Dimensi Perencanaan adalah 2.46, median 2.40 dengan standar deviasi 0.36. Hasil pemeringkatan dimensi Perencanaan

termasuk kategori **Kurang**, dapat dijelaskan bahwa indikator sudah ada namun masih perlu ditambah dari segi jumlah dan ditingkatkan secara kualitas.

3. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan journal diatas sebagai berikut :

1. Pengukuran dengan pendekatan kuantitatif analisis faktor diperoleh bahwa untuk setiap dimensi PeGI yakni pada atribut kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan mempunyai variabel (*atribut*) yang valid dan reliabel berdasarkan nilai r hitung yang tinggi dan koefisien reliabilitas *Cronbach Alpha*.
2. Faktor atau dimensi yang terbentuk juga sudah sesuai dengan model PeGI. Dengan kata lain, seluruh variabel yang diukur dapat menjelaskan atau merepresentasikan dimensi pengukuran PeGI. Penelitian Tugas Akhir ini memberikan kontribusi ilmiah untuk membuktikan secara empiris validitas model PeGI khususnya pada tingkat Pemerintahan Desa di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. Hal ini berarti atribut dan dimensi PeGI masih relevan digunakan untuk mengukur penerapan *e- Government* di Tingkat Kecamatan Kertajati.

PUSTAKA

Ariyani, Pipin Farida. (2009). Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia.

Definition/Domain Framework and Status around the World, Computer Society of India.

Direktorat e-Government. (2011). Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Tahun 2011, Dirjen Aptika Kemenkominfo.

Falih Suaedi (2010), E-Government

Giri, C Narayan. (2004). Multivariate Statistical Analysis Second Edition, Revised and Expanded. New York: Marcell Dekker Inc.

Inpres No. 3 Tahun 2003. (2003). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government Indonesia.

Jurnal Buana Informatika, Vol. 6, No.4, 2015, Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura.

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 10, NO. 3, ANALISIS E-GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (Analysis Of E-Government To Public Services In The Ministry Of Law And Human Rights).

Jurnal SISFO : Inspirasi Profesional Sistem Informasi, Vol. 5, Tahun 2015, Jurnal SISFO : Inspirasi Profesional Sistem Informasi.

Kemkominfo. (2008). Pemeringkatan e-government.

Nag Yeon Lie. (2010). "Penerapan e-government", Seri Modul 3, Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development.

Pacific Council International Policy. (2002). Working Group on e-government in the Developing World, Roadmap for e-government in the Developing World 10 Questions e-government Leaders Should Ask Themselves

Palvia Jain, Shailendra and Sharma S. Sushil. (2007). e-Government and e-Governmenternance :

Scientific Jounal of Informatic, Vol 2 No. 1 tahun 2015, Model Delone and Mclean Untuk Mengukur Kesuksesan E-Government Kota Pekalongan.

Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (SESINDO), 2013, Metode Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) untuk Audit Tata Kelola Teknologi Informasi.

United Nations. (2012). United Nations e-Government Survey 2012 e-Government for The People.

Worldbank. (2011). Definition of e-government.

Wibawa Samudra (2009), Definition of e-government

Yusuf, Suwidhi, 2008, Pemeringkatan E-Government Indonesia, Tesis MTI UI